

# Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Untuk Tidak Menggunakan Bank Syariah: Studi di STIE Pengembangan Bisnis dan Manajemen, Jakarta

Oleh: Sasli Rais<sup>1</sup>

**Abstract:** *The research matters are regarding: (1) Correlation between did't use sharia banking (no customer's) by students of STIE PBM with unknowledge sharia banking; (2) 'keharaman' banking interest; and (3) the location of sharia banking.*

*In order to analyze the correlation between nocustomer's sharia banking, it is used binomial logit-likelihood method.*

*The factor of unknowledge sharia banking, 'keharaman' banking interest; and the location of sharia banking purposes has bigger chances to be students no customer's in STIE PBM of Jakarta.*

**Key Word:** *students of STIE PBM, no customer's, sharia banking,*

## 1. Pendahuluan

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan direvisi dengan UU No. 10 Tahun 1998, sampai saat ini jaringan dan pengguna (nasabah) perbankan syariah terus berkembang. Namun demikian dalam hal kinerja, Data Bank Indonesia per September 2007 menginformasikan bahwa asset perbankan syariah sebesar Rp 31,8 triliun (perbankan nasional sebesar Rp Rp 1.850 triliun, berarti hanya 1,63% saja), jaringan kantor perbankan syariah berjumlah 192 (perbankan nasional berjumlah 9.619). Sedangkan *market share* perbankan syariah saat ini masih sekitar 1,7 persen dari total asset perbankan secara nasional. Angka ini menunjukkan betapa kecilnya kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian Indonesia. Bank Indonesia melalui *blue print* perbankan syariah telah menargetkan *market share* bank syariah sebesar 5.2 persen pada Desember 2008.

Kecilnya *market share* bank syariah salah satunya kemungkinan masih minimnya pengetahuan masyarakat luas dan utamanya mahasiswa dalam hal pengetahuannya mengenai perbankan syariaiah beserta produknya, hokum adanya keharaman bunga bank karena disamakan dengan riba', dan lokasi yang jauh di karenakan masih terbatasnya jumlah jaringan kantor bank syariah sebagaimana data tersebut di atas. Di samping juga, kemungkinan adanya sosialiasi yang belum optimal dilakukan oleh stake holder yang terlibat di dalam pengembangan bank syariah utamanya Bank Indonesia.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka penulis mencoba meneliti tentang *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Untuk Tidak Menggunakan Bank Syariah: Studi di STIE Pengembangan Bisnis dan Manajemen, Jakarta.*

## 2. Tujuan Penelitian dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang itu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang yang menjadikan faktor-faktor mahasiwa tidak menggunakan bank syariah, yang meliputi variabel kekurangpengetahuan mengenai bank syariah, pengetahuan keharaman bunga bank, dan lokasi kantor bank syariah.

Sedangkan rumusan permasalahan penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi kemungkinan mahasiswa tidak menggunakan bank di bank syariah atau belum menjadi nasabahnya

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pengembangan Bisnis dan Manajemen (STIE PBM), Jakarta. Dimuat di Jurnal Pengembangan Bisnis dan Manajemen, Volume VIII, No. 12 April 2008.

### 3. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

#### 3.1. Kerangka Pemikiran

Hasil kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia tahun 2000, mengenai potensi, preferensi, dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah di Pulau Jawa. Diketahui hasilnya bahwa berdasarkan analisis faktor-faktor yang memotivasi masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah ternyata untuk masyarakat Jawa Barat dan Jawa Timur lebih dominan faktor kualitas pelayanan dan kedekatan lokasi bank syariah dari pusat kegiatan (faktor rasional). Sedangkan bagi masyarakat Jawa Tengah, faktor pertimbangan agama adalah faktor terpenting (Husnelly, Jakarta: 2003), termasuk adanya hukum haramnya bunga bank.

Namun, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah untuk menggunakan atau menjadi nasabah pada bank syariah tersebut yang dalam penelitian itu, sama juga terdapat pada mahasiswa STIE PBM. Mungkin memerlukan kajian lebih lanjut, dikarenakan berdasarkan penelitian awal bahwa mahasiswa belum mau mempergunakan perbankan syariah karena masih belum mengetahui perbedaan bunga konvensional dan syariah. Hal ini ditunjang oleh minimalnya ketidakterdediaan informasi tentang keharaman bunga bank konvensional.

Sebagai lembaga keuangan syariah yang relatif masih baru, maka bank syariah berkeinginan mendapatkan hati di masyarakat Indonesia, utamanya mahasiswa sebagai penerus generasi bangsa.

Dalam kondisi yang relatif masih 'baru', maka kemungkinan besar bank syariah masih belum mampu untuk mendapatkan nasabah utamanya mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari masih kecilnya *market share* bank syariah, baru dibawah 2%.

#### 3.2. Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah **1)** adanya hubungan yang signifikan antara tidak digunakannya bank syariah oleh mahasiswa dengan kurangnya pengetahuan tentang bank syariah, hukum haramnya bunga bank, dan lokasi yang kantor bank syariah yang terbatas. kurangnya sosialisasi sebagai faktor belum digunakannya bank syariah oleh mahasiswa. **2)** adanya sosialisasi bank syariah yang belum optimal terhadap masyarakat luas dan mahasiswa pada khususnya.

### 4. Tinjauan Pustaka

#### 4.1 Perbankan Syariah

Bank Muamalat Indonesia, BMI merupakan bank dengan sistem tanpa bunga/ bagi hasil pertama. Pada saat didirikan terkumpul komitmen pembelian saham Rp 84 Milliar dan 3 Nopember 1991 dalam acara silaturahmi presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal Rp 106.126.382.000. Dengan modal awal ini, 01 Mei 1992, BMI mulai beroperasi, namun masih menggunakan UU No. 7 tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepiantas lalu serta direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998 yang telah mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Perbankan Islam di Indonesia mulai menggeliat ketika terjadi krisis perekonomian, dimana perbankan nasional yang mengalami krisis berat, yang mendorong perbankan saat itu beroperasi dengan *negatif spread*, yaitu bunga yang dibayar kepada nasabah penabung lebih tinggi daripada bunga kredit yang diterima. Logis saja apabila kemudian kerugian menggerogoti modal bank, sampai BI mewajibkan program rekapitalisasi. Bayangkan saja, bunga deposito pernah mencapai 60 % saat itu. Logikannya, bank harus memberi kredit

dengan bunga setinggi itu. Masalahnya, bisnis apa yang mampu membayar bunga setinggi itu dalam keadaan krisis seperti saat itu? Jangankan untuk membayar bunga, yang terjadi malah kredit macet (Karim, Adi Warman: 2001, hal. 65).

Sejak krisis ekonomi itulah, beberapa bank konvensional mulai melihat ke sistem bank syariah, dengan memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk baik dengan mengkonversi bank konvensional dengan menjadi bank syariah sepenuhnya maupun hanya dengan membuka divisi atau cabang atau window syariah. dalam institusinya (Antonio, M. Syafei: 2001, hal. 26).

#### 4.2 Faktor-Faktor Pendukung

Keberadaan bank Islam di Indonesia masih memiliki peluang yang mengembirakan dan perlu dioptimalkan guna membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan dan pendayaan ekonomi nasional, selain restrukturisasi perbankan. Hal itu dikarenakan adanya beberapa pertimbangan, antara lain ;

**(1) Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga.**

Rakyat Indonesia 85 % beragama Islam, meskipun pada hakikatnya agama non Muslim pun (Yahudi dan Nasrani) juga menolak konsep bunga ini (Rahardjo, M. Dawam: 1990, hal. 42-48), yang telah nyata gagal dalam usahanya mensejahterakan masyarakat, bahkan telah membuat terpuruk perekonomian Indonesia. Apabila penduduk Indonesia saat ini 220 juta maka 187 juta adalah beragama Islam, meskipun tidak semua orang Muslim memahami konsep bunga, terutama ulama dan cendekiawan yang secara khusus memiliki pengikut, seperti ulama dan cendekiawan yang ada di organisasi sosial kemasyarakatan (NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dll.) maupun organisasi partai politik (PK, PBB, PNU, dll.) untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi tentang keberadaan perbankan syariah secara terus-menerus.

**(2) Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.**

Dalam sistem perbankan konvensional, konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur yang antagonis. Seorang debitur harus dan wajib mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya, apakah debitur mendapatkan untung atau rugi. Kreditur tidak mau ambil peduli. Hal ini berbeda dengan sistem perbankan syariah. Konsep yang diterapkan hubungan antar investor yang harmonis, sehingga adanya saling kerjasama dan kepercayaan karena dalam perbankan syariah menerapkan *nilai ilahiyah* sebagai pengendali yang bersifat transendental dan nilai keadilan, persaudaraan, kepedulian sosial yang bersifat horisontal.

**Tabel 1. Perbandingan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional**

<b>Bank Islam</b>	<b>Bank Konvensional</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan investasi yang halal saja;</li> <li>▪ Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa;</li> <li>▪ Profit dan kemakmuran dunia akhirat oriented (falah);</li> <li>▪ Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan;</li> <li>▪ Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pertimbangan Syariah (DPS).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Halal dan haram;</li> <li>▪ Memakai bunga;</li> <li>▪ Profit oriented;</li> <li>▪ Debitur - kreditur;</li> <li>▪ Tidak ada dewan sejenis DSN</li> </ul>

**Sumber:** Antonio, Muhammad Syafe'i, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Cetakan ke-4, Gema Insani Press: Jakarta, 2001, hal. 61.

### **(3) Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan**

Sistem perbankan syariah memiliki keunggulan komparatif berupa penghapusan pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan pembiayaan yang ditujukan pada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral (halal).

Produk perbankan seperti berupa tabungan, giro dan deposito yang menerapkan prinsip-prinsip simpanan, bagi hasil, jual beli, sewa, jasa (Qordhowi, Yusuf: 1997, hal. 113-115).

### **(4) Peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah**

Gairah perbankan nasional, baik keinginan untuk membuka kantor bank umum syariah ataupun kantor unit syariah dapat terlihat dari perkembangan yang pesat jumlah perbankan syariah di Indonesia. Apabila saat krisis tahun 1998 baru ada satu Bank Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, dengan 9 kantor cabang dan itu hanya tersebar di Pulau Jawa dan 77 BPRS maka per tanggal 23 Juli 2002, sudah ada 2 Bank Umum Syariah, yaitu BMI dan BSM serta 6 Bank Umum Konvensional yang membuka unit syariah, yaitu BNI 1946, Bukopin, BRI, Danamon, IFI dan Bank Jabar dengan 36 kantor cabang, 52 kantor cabang pembantu serta 81 BPRS yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dan saat ini sudah ada 192 kantor cabang bank syariah di seluruh Indonesia.

Kinerja bank syariah juga sangat memuaskan. Hal ini dapat terlihat dari LDR atau perbandingan jumlah kredit dengan DPK, yang rata-rata 100%. Ini masih lebih bagus dibandingkan LDR perbankan nasional yang hanya 39 %.

### **(5) Adanya pelayanan yang meluruskan pelanggan dengan sesuai Islam**

Hal itu dapat terbukti dengan diraihnya penghargaan Quality Assurance Service Australia, predikat ISO 9001 tahun 2000 untuk pelayanan bank khususnya *customer service dan taller banking* diberikan pada salah satu bank syariah yaitu BMI, serta Market Research Indonesia tahun 2000, yang memasukkan BMI masuk deretan unggulan terbaik dari 5 bank dalam pelayanan (Baraba, Achmad: Koran Media Indonesia, 2002).

## **4.3 Faktor-Faktor Penghambat**

Faktor penghambat berkaitan dengan penerapan suatu sistem perbankan yang baru, suatu sistem yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip-prinsip dengan sistem yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Faktor-faktor penghambat itu adalah sbb. :

### **(1) Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah**

Hal demikian, dikarenakan masih tahap awal pengembangan dapat dimaklumi bahwa pemahaman sebagian masyarakat mengenai sistem dan prinsip perbankan syariah masih belum tepat. Pada dasarnya, Sistem Ekonomi Islam telah jelas, yaitu melarang praktek riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil, akan tetapi, secara praktis, bentuk produk dan jasa pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antar bank dan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syariah, masih perlu disosialisasikan secara luas.

Adanya perbedaan karakteristik produk bank konvensional dengan bank syariah telah menimbulkan adanya keengganan bagi pengguna jasa perbankan. Keengganan tersebut disebabkan oleh hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dari simpanan. Oleh karena itu, secara umum perlu diinformasikan bahwa dana pada bank syariah juga dapat memberikan keuntungan finansial yang kompetitif. Disamping itu, salah satu karakteristik khusus dari hubungan bank dengan nasabah dalam sistem perbankan syariah adalah adanya *moral force* dan tutunan terhadap etika usaha yang tinggi dari semua pihak. Hal ini selanjutnya akan mendukung prinsip kehati-hatian dalam usaha bank maupun nasabah.

**(2) Peraturan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodir operasional bank syariah**

Hal ini disebabkan adanya sejumlah perbedaan dalam operasional antara bank syariah dan bank konvensional. Ketentuan perbankan perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syariah sehingga bank syariah dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain hal yang menyatakan :

- (a) Instrumen yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas;
- (b) Instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank sentral;
- (c) Standar akuntansi, audit dan pelaporan;
- (d) Ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian, dsb.

**(3) Jaringan kantor bank syariah yang belum luas**

Pengembangan jaringan bank syariah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, kurangnya jumlah bank syariah yang ada juga menghambat perkembangan kerjasama antar bank syariah. Kerjasama yang sangat diperlukan antara lain, berkenaan dengan penempatan dana antar bank dalam hal mengatasi masalah likuiditas sebagai suatu badan usaha, bank syariah perlu beroperasi dengan skala yang ekonomis. Karenanya, jumlah jaringan kantor bank yang luas juga akan meningkatkan efisiensi usaha. Berkembangnya jaringan bank syariah juga diharapkan dapat meningkatkan komposisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa bank syariah.

Sebagai bahan pertimbangan, di bawah ini dapat dilihat perbandingan bank syariah di Indonesia dan Malaysia pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. Perbandingan Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia**

Perkembangan	Indonesia (2001)	Malaysia (2000)
Pengembangan Sistem	1990-an	1982-an
Jumlah	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2 bank syariah</li><li>▪ 3 unit usaha syariah</li><li>▪ 81 BPRS</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2 bank Islam</li><li>▪ 47 window bank konvensional</li></ul>
Pangsa Pasar	0.25 %	6,9 %
Proyeksi	Garis besar pelayanan	Rinci berserta tahap pencapaian

Sumber: Hamidi, M. Luthfi: Republika, 05 April 2002.

**(4) Kecilnya market share**

Adanya bank syariah yang beroperasi dengan tujuan utama menggerakkan perekonomian secara produktif. Di samping menjalankan fungsi intermediasi karena secara syariah tugas bank selaku *mudharib* harus menginvestasikan pada sektor ekonomi secara riil untuk kemudian berbagi hasil dengan *sahibul maal* sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Hal ini terbukti, meskipun *market share* bank syariah masih sangat kecil, yaitu kurang dari 2%, namun rasio pembiayaan dengan DPK lebih dari 100%, yang berarti bank telah menjalankan fungsi intermediasinya tersebut.

Masih kecilnya *market share* itu disebabkan antara lain karena bank syariah mempunyai keterbatasan dana baik dari segi permodalan maupun jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun.

**(5) Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit**

Kendala-kendala di bidang SDM dalam pengembangan perbankan syariah disebabkan sistem ini masih belum lama dikembangkan. Disamping itu, lembaga-lembaga

akademik dan pelatihan dibidang ini sangat terbatas sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman dibidang non perbankan syariah, baik dari sisi bank pelaksana maupun dari bank sentral (pengawas dan peneliti bank), masih sangat sedikit. Pengembangan SDM dibidang perbankan syariah sangat perlu karena keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan, serta ketrampilan pengelola bank. SDM dalam perbankan syariah harus memiliki pengetahuan yang kas dibidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktek perbankan, serta mempunyai komitmen kuat untuk menerapkannya secara konsisten. Dalam hal pengembangan bank syariah dengan cara mengkonversi bank konvensional menjadi bank syariah atau membuka kantor cabang syariah oleh bank umum konvensional. Permasalahan ini menjadi lebih penting karena diperlukan suatu perubahan pola pikir dari sistem usaha bank yang beroperasi secara konvensional ke bank yang beroperasi dengan prinsip syariah (Antonio, M. Syafei, op cit hal. 225-226):

Menurut M. Luthfi Hamidi, kelemahan yang dimiliki oleh bank syariah dalam operasionalnya, yaitu antara lain :

- (a) Mutu pelayanan manajemen keuangan yang masih belum baik, yang mungkin dikarenakan masih terlalu menerapkan prinsip kehati-hatian, kekhawatiran adanya kredit macet atau juga yang lain;
- (b) Kekurangan modal yang dimiliki oleh bank syariah, sedangkan pemerintah seakan-akan masih enggan membantunya. Pemerintah lebih memperhatikan bank komersial konvensional dengan kebijakan meratifikasinya, seperti BNI 46 berjumlah Rp 600 M, Bank Mandiri berjumlah Rp 1.4 T, dan Bank Lippo berjumlah Rp 2 T. Sedangkan sampai saat ini bank syariah modalnya masih didominasi oleh donor Timur Tengah (Hamidi, M. Luthfi: Republika, 05 April 2002).

#### 4.4 Hukum Bunga Bank

Melalui keputusan melalui forum Rakernas MUI, (14-16 Desember 2003) tentang bunga bank haram, yang menetapkan bahwa semua transaksi berdasarkan bunga adalah haram, karena sudah memenuhi unsur-unsur riba. Maka konsekuensinya, masyarakat diminta supaya tidak menggunakan lembaga keuangan lainnya maupun individu (Republika, 19 Desember 2003). Sebenarnya fatwa haramnya bunga bank itu didukung *Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama*. Setelah melaksanakan beberapa kali sidang, Lajnah berpendapat bahwa hukunya bunga pinjaman bank adalah sama seperti hukum gadai. Diantaranya terdapat beberapa pendapat Ulama NU tentang bunga pinjaman sebagai berikut: *Haram*, sebab termasuk rente pinjaman. *Halal*, sebab syarat sudah terjadi sewaktu akad dibuat, sedangkan adad tidak dapat begitu saja dijadikan syarat. *Syubat* (tidak menentu halal - haramnya, sebab para ahli hukum masih berselisih pendapat dan *Majelis Tarjih Muhammadiyah* yang menetapkan bahwa Riba' hukumnya haram dengan nash sharih Al Qur'an dan As Sunnah, Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal, Bunga yang diberikan oleh bank- bank negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang berlaku selama ini termasuk perkara musytabihat, menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga yang perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Meskipun terjadi perbedaan pendapat, Lajnah menentukan pilihan dengan prinsip kehati-hatian, dan menyatakan bahwa bunga bank adalah tambahan pembayaran atas pinjaman yang diharamkan oleh Islam.

Meskipun hukum 'haram'-nya bunga bank itu lebih banyak ulama yang setuju (yang tidak setuju lebih pada, apakah fatwa itu perlu disampaikan pada saat ini atau menunggu saat yang tepat), karena sampai saat ini masih ada juga ulama yang tidak sepakat dikarenakan adanya persepsi yang berbeda, dalam hal apakah riba dan bunga bank itu sama atautkah riba dan bunga itu berbeda. Sedangkan ulama yang mengharamkan bunga bank, mempersamakan antara riba dan bunga bank.

Karenanya, ditengah pembahasan tentang hukum haramnya bunga bank yang lagi hangat ini, mungkin kita perlu memikirkan hal-hal yang sifatnya esensi dengan apabila

dikeluarkannya fatwa itu. Dan yang perlu diperhatikan oleh kita semua, terutama MUI sebagai pengambil kebijakan pembuatan fatwa itu untuk tetap memperhatikan kemaslahatan dan kemudharatan di tengah masyarakat, apabila fatwa haramnya bunga bank itu dikeluarkan secara resmi dan sudah final.

Segi kemaslahatan apabila dikeluarkannya fatwa haramnya bunga bank itu, antara lain: **Pertama**, Masyarakat, terutama umat Islam akan menambah keyakinan akan haramnya bunga bank, yang selama ini merasa bingung dikarenakan di antara mereka masih berdebat pendapat tentang halal dan haramnya bunga bank, sehingga dengan dikeluarkannya fatwa haramnya bunga bank, paling tidak ada ada 'ulama atau institusi' resmi yang dipercaya oleh mereka, melalui pemerintah (MUI) yang telah memfatwakan akan 'haramnya bunga bank' itu. **Kedua**, Masyarakat, dalam hal ini nasabah yang telah bergabung dengan perbankan syariah juga bertambah mantap untuk menjadi nasabah yang 'minded' bank syariah. **Ketiga**, Bagi perbankan syariah sendiri, mengharapkan masyarakat muslim dapat mengalihkan dananya dari bank konvensional ke syariah dengan adanya fatwa haramnya bunga bank, karena mereka telah tersadarkan dengan fatwa tersebut.

#### 4.5 Sosialisasi Perbankan Syariah

Keseriusan Bank Indonesia mensosialisasikan bank syariah perlu dipertanyakan, selama ini BI belum memberikan perhatian berarti bagi upaya sosialisasi bank syariah. Sosialisasi baru 51 kali dalam setahun. BI sebenarnya telah mendorong secara signifikan dari aspek regulasi seperti *office channeling* dan peraturan lainnya yang mendukung berkembangnya perbankan syariah. Namun dari segi edukasi yang meluas, masih jauh panggang dari api. Hal ini dapat dilihat kecilnya *market share* kurang dari 2%.

Bertenggangnya *market share* perbankan syariah sejak belasan tahun di atas satu koma, salah satunya karena program sosialisasi yang dilakukan masih sangat minim (belum optimal) dan belum tepat. Artinya, sosialisasi perbankan syariah masih sangat kurang. Masyarakat luas di berbagai segmen masih terlalu banyak belum mengerti sistem, konsep, filosofi, produk, keuntungan dan keunggulan bank syariah.

Minimnya gerakan sosialisasi tersebut terlihat dari upaya yang dilakukan oleh BI. Menurut laporan akhir tahun BI 2006, kegiatan sosialisasi oleh BI sepanjang tahun 2006 hanyalah 51 kali. Sebuah upaya yang minim mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia. Idealnya dalam setahun bisa dilakukan minimal 5 juta kali sosialisasi dalam setahun, bukan 51 kali.

Bentuk sosialisasi perbankan syariah sangat beragam dan luas, seperti melalui media massa cetak atau elektronik, buletin, majalah, buku, lembaga pendidikan, termasuk sosialisasi dalam bentuk edukasi masyarakat melalui dialog dan ceramah secara langsung kepada umat. M.A.Mannan, sejak tahun 1970 telah mengingatkan pentingnya upaya edukasi masyarakat tentang keunggulan sistem syariah dan keburukan dampak sistem ribawi.

Idealnya sosialisasi bank syariah dilakukan sebanyak 5 juta kali dalam setahun. Asumsinya, jumlah masjid di Indonesia sekitar 600.000 buah, jika dalam setahun hanya 1 kali sosialisasi di tiap masjid, maka dibutuhkan 600.000 kali sosialisasi karena di masjid tidak cukup hanya sekali sosialisasi, minimal 3/4 kali sosialisasi, agar pemahaman jamaah benar-benar mendalam, bukan sekedar kulit. Karenanya, jika di setiap masjid hanya dilakukan 4 kali sosialisasi, maka dibutuhkan 2,4 juta kali sosialisasi. Belum termasuk sosialisasi terhadap 600.000 pimpinan ta'mir masjid & ulamanya sebagai yang akan menyampaikan ekonomi Islam (bank) kepada jamaahnya. Untuk melatih ta'mir masjid & ulamanya minimal dibutuhkan 6.000 kali sosialisasi, dengan asumsi setiap sosialisasi dihadiri 100 peserta dan setiap sosialisasi memakan waktu 3 hari. Sosialisasi juga mutlak dilakukan berkali-kali dalam setahun kepada majlis *ta'lim* baik untuk bapak maupun ibu bahkan juga *majlis ta'lim* untuk pemuda/ pemudi secara khusus yang tersebar di seluruh Indonesia. Hampir di setiap desa dan kelurahan terdapat *majlis ta'lim*, jumlahnya ratusan ribu *majlis*

*ta'lim*. Jika sosialisasi kepada *majlis ta'lim* dilakukan hanya 4 kali, maka paling tidak dibutuhkan 3 juta kali sosialisasi dengan asumsi di Indonesia ada 750 ribu *majlis ta'lim*.

Belum lagi sosialisasi terhadap pesantren yang jumlahnya mencapai 15 ribu yang tersebar di Indonesia. Jika dalam setahun hanya 1 kali kegiatan sosialisasi, maka dibutuhkan 15.000 kali sosialisasi. Sosialisasi juga harus dilakukan kepada seluruh seluruh Perguruan Tinggi (PT), tidak saja kepada fakultas ekonomi dan fakultas syariah tetapi juga ke seluruh civitas akademika, biro rektor dan sebagainya. Jumlahnya secara keseluruhan juga tidak kurang dari 15.000.-. Demikian pula kepada seluruh sekolah Madrasah Aliyah, Tsanawiyah, MAN, dan SMU. Jumlahnya lebih dari 50.000 sekolah. Demikian pula kepada aparat pemerintah di setiap kecamatan, kabupaten kota, para pegawai di dinas-dinas pemerintah, DPRD, instansi departemen di tingkat propinsi dan kabupaten kota. Belum lagi kelompok KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji). Bahkan tidak mustahil sosialisasi kepada sekolah SD dan TK, agar bank syariah lebih dikenal sejak awal.

Berdasarkan kebutuhan akan sosialisasi tersebut, maka tidak aneh jika saat ini dibutuhkan 5 juta kali sosialisasi oleh para ahli dan atau ustaz yang terlatih. Iklan di televisi, radio memang dibutuhkan, namun sosialisasinya melahirkan market yang mengambang (floating), tidak mendalam dan signifikan mencerdaskan umat Islam yang mendengarnya. Maka di samping iklan media massa seperti itu, sangat diperlukan pula edukasi langsung kepada masyarakat dengan metode dan materi yang tepat. Perlu menjadi catatan, bahwa Bank Indonesia tidak boleh merasa bahwa sosialisasi yang dilakukannya sudah terlalu banyak. Ini kesalahan yang sangat fatal. Sosialisasi yang dilakukan Bank Indonesia bagaikan setetes air di tengah sungai yang besar, hampir tidak berpengaruh bagi masyarakat secara signifikan, maka tidak aneh jika sejak beberapa tahun terakhir market share bank syariah masih kecil. Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang luas. Penduduknya lebih dari 200 juta. Maka edukasi bank syariah mustahil dilakukan sendirian oleh Bank Indonesia dan PKES yang dibentuknya, ditambah promosi bank-bank syariah.

Upaya-upaya promosi dan sosialisasi itu masih sangat kecil dan terbatas. Sebagian besar umat Islam Indonesia belum mengerti tentang sistem perbankan syariah. Puluhan ribu ulama yang berkhutbah di mesjid belum menyampaikan materi ekonomi syariah secara rasional, ilmiah, bernash agama dan meyakinkan umat. Hal ini karena para ulama/ustadz belum mengerti ilmu perbankan syariah. Ratusan ribu mesjid masih sepi dari topik ekonomi syariah dan bank syariah, karena para ustadznya tidak mengerti pada keunggulan bank syariah. Malah masih terlalu banyak ulama yang berpandangan miring tentang perbankan syariah. Seandainya para ustadz/ulama telah dicerdaskan dengan ilmu muamalah yang ilmiah (*'aqliyah*) dalam bidang perbankan, niscaya *market share* perbankan syariah tidak seperti saat ini, bahkan akan tercipta customer yang rasional, bermoral dan loyal. Jika sosialisasi sudah tepat dan benar dilakukan, hampir dipastikan tak ada jamaah mesjid yang mendukung bank-bank konvensional yang memakai bunga. Jamaah mesjid di Indonesia lebih dari 100 juta umat. Kini nasabah bank syariah masih 2 jutaan. Itu berarti hampir seluruh jamaah mesjid yang berhubungan dengan perbankan masih menggunakan bank-bank ribawi (Agustianto, 02 Januari 2008).

#### **4.6 Pendekatan Sosialisasi - Komprehensif**

Selama ini pendekatan sosialisasi belum utuh dan integratif, sehingga virus keraguan para ulama dan masyarakat termasuk mahasiswa tentang perbankan syariah tidak hilang. Senjata sosialisasi yang ada selama ini belum ampuh menaklukkan ilmu para ulama, akademisi dan tokoh agama. Maka diperlukan modul dan materi yang telah terbukti ampuh berhasil merubah paradigma ulama dan meyakinkan mereka secara rasional, ilmiah, tajam dan disertai pendekatan ilmu-ilmu syariah itu sendiri. Jika personil BI atau pun bank syariah yang berasal dari pendidikan umum memberikan sosialisasi kepada para ulama pesantren, maka ulama dapat saja menolak berdasarkan



ilmu ushul fiqh/ disiplin ilmu syariah lainnya. Para ulama menganggap bahwa para bankir dari BI dan bank syariah tidak ahli dalam tafsir ayat-ayat *al-quran*, *hadits*, *ilmu ushul fiqh*, *tarikh tastri'* dsb. Karena itu, pendekatan kepada ulama haruslah melalui pendekatan ilmu-ilmu syariah sendiri ditambah ilmu-ilmu moneter dan perbankan secara utuh. Sebaliknya jika ulama pesantren yang melakukan sosialisasi, juga tidak cukup karena pendekatannya sering dengan ideom halal haram, penggunaan dalil *naqli an sich* dan kering dari teori-teori rasional yang ilmiah atau tidak ada informasi ilmiah yang dilekatkan kepada syariah.

Sosialisasi kepada umat, bukan melulu pendekatan religius normatif (emosional) dan karena label syariah, tetapi lebih dari itu, sebuah materi yang berwawasan ilmiah, rasional dan obyektif. Jadi, gerakan edukasi dan pencerdasan secara rasional tentang perbankan syariah sangat dibutuhkan, bukan hanya mengandalkan kepatuhan (loyal) pada syariah. Masyarakat yang loyal syariah terbatas paling sekitar 10-15%. Masyarakat harus dididik, bahwa menabung di bank syariah, bukan saja karena berlabel syariah, tetapi lebih dari itu, sistem ini dipastikan akan membawa rahmat dan keadilan bagi ekonomi masyarakat, negara dan dunia, tentunya juga secara individu menguntungkan. Dalam edukasi, masyarakat betul-betul dicerdaskan, masyarakat diajak agar tidak berpikir sempit, tetapi rasional, obyektif, berpikir untuk kepentingan jangka panjang. Karena informasi keilmuan yang terbatas, masyarakat masih banyak yang menyamakan bank syariah dan bank konvensional secara mikro dan sempit. Masyarakat (publik) masih banyak yang belum mengerti betapa sistem bunga, membawa dampak yang sangat mengerikan bagi keterpurukan ekonomi dunia dan negara-negara bangsa. Karena itu sistem syariah harus dibangun secara bertahap, terprogram dan terukur dengan target-target yang realistis. Jika masyarakat masih menganggap sama bank syariah dengan bank konvensional, itu berarti, masyarakat belum faham tentang ilmu moneter syariah, dan ekonomi makro syariah tentang interest, dampak bunga terhadap inflasi, produktitas, unemployment, juga belum faham tentang prinsip, filosofi, konsep dan operasional bank syaria'h. Menggunakan pendekatan rasional sempit melalui iklan yang floating (mengambang) hanya menciptakan customer yang rapuh dan mudah berpindah-pindah. Maka perlu menggunakan pendekatan rasional komprehensif, yaitu pendekatan yang menggabungkan antara pendekatan rasional, moral dan spiritual. Pendekatan rasional adalah meliputi pelayanan yang memuaskan, tingkat bagi hasil dan margin yang bersaing, kemudahan akses dan fasilitas. Pendekatan moral adalah penjelasan rasional tentang dampak sistem ribawi bagi ekonomi negara, bangsa dan masyarakat secara agregat, bahkan ekonomi dunia. Maka secara moral, tanpa memandang agama, semua orang akan terpenggil untuk meninggalkan sistem riba.

Pendekatan spiritual adalah pendekatan emosional keagamaan karena sistem dan label syariah. Pendekatan ini cocok bagi mereka yang taat menjalankan agama, atau masyarakat yang loyal kepada aplikasi syariah. Upaya membangun pasar spiritual yang loyal masih perlu dilakukan, agar *share*-nya terus meningkat. Semakin gencar sosialisasi membangun pasar spiritual, maka semakin tumbuh dan meningkat asset bank-bank syariah. Jika Bank Indonesia dan bank-bank syariah bekerjasama dan para akademisi serta ulama secara serius dalam mengedukasi masyarakat, maka akan terjadi kemajuan yang luar biasa, tidak saja loncatan hebat dalam *market share* bank syariah, tetapi juga terbangun kecerdasan umat dalam memilih lembaga perbankan secara ilmiah dan istiqamah (Agustiarto, 02 Januari 2008).

## **5. Metodologi Penelitian**

### **5.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pengembangan Bisnis dan Manajemen (STIE PBM), Jakarta selama 5 Tahun, yaitu dari tahun 2003-2007.

## 5.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan seluruh elemen yang sejenis, akan tetapi dapat dibedakan satu sama lain (J. Supranto, 1990: 15). Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa STIE PBM. Dalam penelitian ini, yang jumlah sampel yang diambil sebanyak 125 saja, dikarenakan kondisi data.

Penarikan sampel dengan dengan teknik *non probability sampling*, yaitu prosedur penarikan sampel yang bersifat subyektif, dalam hal ini probabilitas pemilihan anggota populasi tidak dapat ditentukan. Hal ini disebabkan setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Penarikan sampel non prababilitas ini dapat menghemat waktu dan biaya karena tidak memerlukan adanya kerangka penarikan sampel. Dan salah satu teknik *non probability sampling*, adalah penarikan sampel berdasarkan convenience sampling (Parasuraman A., 1991: 65-66). Prosedurnya adalah memberikan pertanyaan kepada mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Mata Kuliah Agama Islam dari tahun 2003-2007.

## 5.3 Disain Penelitian

Penelitian ini, jenis penelitian studi kasus dan untuk mencapai tujuannya, digunakan *metode analisis-deskriptif-survei*, yaitu suatu metode yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada terhadap sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki pada masa sekarang, baik itu sosial, politik maupun ekonomi. Moh. Nasir (1999: 63) menyatakan, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara berlaku dalam masyarakat, situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

Hadari Nawawi (1990: 63) menyatakan, metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan mendeskripsikan kondisi subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada masa kini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode pendekatan analisis deskriptif lebih banyak digunakan dalam arti tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, akan tetapi bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial yang kompleks.

## 5.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, yang menjadi *independent variable* adalah, yaitu mahasiswa yang tidak menggunakan bank syariah dikarenakan kekurangpengetahuan tentang keberadaan bank syariah, yang disimbolkan dengan (X1), faktor keharaman bunga bank, (X2), dan lokasi kantor bank syariah, (X3). Sedangkan mahasiswa yang tidak menggunakan bank syariah (tidak menjadi nasabah) sebagai *dependent variable*, sebagai variabel yang dipengaruhi disimbolkan dengan Yi.

## 5.5 Instrumen Penelitian dan Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data, maka perlu ditentukan instrumen yang akan digunakan, yaitu dengan memperhatikan jenis data yang akan dikumpulkan dan bagaimana mendapatkannya, maka dibuat instrumen penelitiannya. Instrumen yang akan digunakan adalah pengetahuan tentang bank syariah, keharaman bunga bank, dan lokasi bank syariah, yang datanya diambil berdasarkan data primer, yaitu berupa data yang diperoleh dari mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Agama Islam di STIE PBM dari tahun 2003-2007, dengan cara memberikan pertanyaan questioner dan *indept interview*. Dengan data yang diambil sampelnya sejumlah 125 orang.

## 5.6 Metode Pendekatan Analisis

### 5.6.1. Pemodelan

Untuk mencapai tujuan peneliti ini, maka teknis analisisnya dengan menggunakan pendekatan analisis *multiple regression* dengan menggunakan *dummy variabel*. Metode penaksirannya dengan model logit, dengan menggunakan metode *maximum likelihood/binomial logit* dikarenakan variabel terikatnya hanya terdiri 2 (dua) kategori, yaitu ya dan tidak.

Dalam model logistik dikotomi, variabel dinyatakan dalam fungsi logit untuk  $Y = 1$  dibandingkan dengan fungsi logit untuk  $Y = 0$ . Fungsi logit untuk  $Y = 1$  relatif terhadap fungsi logit untuk  $Y = 0$

Dalam hal demikian, maka kategori  $Y = 0$ , kita sebut sebagai kategor rujukan atau pembanding (*reference group*).

Secara umum, apabila kita hendak menganalisis model dengan  $p$  variabel bebas, maka fungsi logitnya dapat dinotasikan sebagai berikut :

$$Z(x) = \ln \left[ \frac{\Pr(Y=1|x)}{\Pr(Y=0|x)} \right] = \ln \left[ \frac{p}{1-p} \right] = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 \dots = \beta_p \beta_p \quad \Pr$$

$$p = \Pr(Y=1|x) = \frac{e^z}{1+e^z}$$

$$1-p = \Pr(Y=0|x) = \frac{1}{1+e^z}$$

perbandingan, dalam model logit dikotomi, pengestimasi parameter dilakukan pada bentuk rasio antara  $\Pr(Y=1|x)$  dan  $\Pr(Y=0|x)$ . Lebih spesifik lagi, yang diestimasi adalah :

$$\ln \left[ \frac{p}{1-p} \right] = z = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 \dots = \beta_p \beta_p$$

Model ini dapat diestimasi melalui teknik *maximum likelihood*, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Kemudian dengan menggunakan metode taksiran *maximum likelihood* parameter-parameter dalam model tersebut dapat diestimasi (Nachrowi, 2002: 307).

### 5.6.2. Definisi Variabel

*Dependent variable* adalah variabel yang nilainya dipengaruhi variabel-variabel lain, atau variabel yang dapat berubah akibat perubahan variabel lain. Dalam pemodelan ini, variabel terikatnya adalah mahasiswa yang tidak menggunakan bank syariah (non nasabah). Didefinisikan:

- $Y = 0$ , apabila menggunakan bank syariah.
- $Y = 1$ , apabila tidak menggunakan bank syariah.

*Independent variable* adalah variabel yang nilainya tidak ditentukan oleh pengaruh variabel lain, dan variabel ini adalah yang dapat mengakibatkan perubahan nilai variabel lainnya. Didefinisikan :

- Faktor Tidak Menggunakan Bank Syariah

Merupakan faktor yang mempengaruhi mahasiswa tidak menggunakan perbankan syariah. Variabel ini dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu :

- ✓ 0 = faktor belum adanya kantor bank syariah terdekat (Lokasi) tentang sebagai kategori rujukan.
- ✓ 1 = faktor kekurangtahuan mengenai bank syariah (Pengetahuan)
- ✓ 2 = faktor keharaman bunga bank (Bunga)

Variabel ini kemudian dibentuk menjadi 2 *variabel dummy*, yaitu, dengan definisi sebagai berikut :

Faktor Tidak Menggunakan bank syariah	Variabel Dummy	
	Pengetahuan-1	Bunga-2
• Lokasi;	0	0
• Pengetahuan;	1	0
• Bunga;	0	1

### 5.6.3. Sumber dan Ukuran Data

Studi ini menggunakan data primer, yang diperoleh dari responden yang menjadi mahasiswa di STIE Pengembangan Bisnis dan Manajemen, Jakarta, dengan ukuran sampel berjumlah 125 responden yang jelas tidak menggunakan perbankan syariah.

Model yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$\ln = \left[ \frac{p_1}{1 - p_0} \right] = z_1 = c_1 + \gamma_{11} \text{ Pengetahuan} + \gamma_{12} \text{ Bunga}$$

$$\ln = \left[ \frac{p_2}{1 - p_0} \right] = z_2 = c_2 + \gamma_{21} \text{ Pengetahuan} + \gamma_{22} \text{ Bunga}$$

$$p_0 = \frac{1 + e^{z_1} + e^{z_2}}{e^{z_1}}$$

$$p_1 = \frac{1 + e^{z_1} + e^{z_2}}{e^{z_2}}$$

$$p_2 = \frac{1 + e^{z_1} + e^{z_2}}{1 + e^{z_1} + e^{z_2}}$$

### 5.6.4. Pengamatan Model

Jika salah satu variabel bebas, misal pengetahuan, nilainya naik, maka  $\ln(p_1/p_2)$  nilainya akan naik pula. Berarti  $(p_1/p_0)$  juga meningkat. Namun, hal tersebut tidak berarti nilai  $p_1$  juga meningkat. Nilai  $p_1$  dapat menurun apabila nilai  $p_0$  juga menurun dan penurunan nilai  $p_0$  lebih cepat apabila dibandingkan dengan nilai penurunan  $p_1$ . Hal ini terjadi pada model regresi logistik dikotomi, karena apabila nilai pembilang  $p$  meningkat, maka penyebut  $1-p$ , selalu menurun, sehingga  $(p/1-p)$  meningkat lebih besar lagi.

Rumus persamaan regresi gandanya adalah sebagai berikut (Nachrowi, 2002: 251).

Dimana:

$$\ln \left( \frac{p}{1-p} \right) = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + e$$

$\frac{p}{1-p}$  = Mahasiswa Tidak Menggunakan Bank Syariah  
 $i$  = N (banyaknya observasi/nasabah)  
 $\beta_0$  = Konstanta  
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Intercept  
 $X_1$  = Pengetahuan tentang bank syariah  
 $X_2$  = Keharaman Bunga Bank  
 $X_3$  = lokasi bank syariah

### 5.6.5. Pengujian Signifikansi Model dan Parameter

#### 1). Uji Seluruh Model (Uji G)

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_p = 0$$

$$H_1 : \text{sekurang-kurangnya terdapat satu } \beta_j \neq 0$$

Statistik uji yang digunakan :

$$G = -2 \ln \left[ \frac{\text{Likelihood (Model B)}}{\text{Likelihood (Model A)}} \right]$$

Model B : model yang hanya terdiri dari konstanta saja.

A : model yang terdiri dari seluruh variabel.

G berdistribusi Khi Kuadrat dengan derajat bebas p atau  $G \sim \chi_p^2$ ,  $H_0$  ditolak jika  $G > \chi_{\alpha, p}^2$ , apabila  $H_0$  ditolak, artinya model A signifikan pada tingkat signifikansi  $\alpha$ .

#### 2). Uji Wald ( uji signifikansi tiap-tiap parameter )

$$H_0 : \beta_j = 0 \text{ untuk suatu } j \text{ tertentu, } j = 0, 1, \dots, p.$$

$$H_1 : \beta_j \neq 0$$

Statistik uji yang digunakan adalah :

$$W_j = \left[ \frac{\beta_j}{SE(\beta_j)} \right]^2 ; j = 0, 1, 2, \dots, p$$

Statistik ini berdistribusi Khi Kuadrat dengan derajat bebas 1 atau secara simbolis ditulis  $W_j > \chi_{1, \alpha}^2$ ,  $H_0$  ditolak jika  $G > \chi_{\alpha, p}^2$ , dengan  $\alpha$  adalah tingkat signifikansi yang dipilih, apabila  $H_0$  ditolak, artinya parameter tersebut signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi  $\alpha$ .

Interpretasi dilakukan dengan cara yang sama dengan interpretasi pada variabel bebas dikotomi, yaitu tiap-tiap kategori dibandingkan dengan kategori rujukannya.

## 6. Analisa dan Pembahasan

### 6.1 Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan data tentang mahasiswa yang tidak menggunakan bank syariah dikarenakan faktor kekurangpengetahuan bank syariah, keharaman bunga bank, dan lokasi bank syariah, seperti tertera pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 3. Jumlah Mahasiswa yang Tidak Menggunakan Bank Syariah Dikarenakan Faktor Pengetahuan, Bunga, dan Lokasi**

No	Keterangan	Nasabah
1.	Kekurangpengetahuan	70
2.	Keharaman Bunga Bank	40
3.	Jauhnya Lokasi bank syariah	15
<b>Total</b>		<b>125</b>

Sumber: STIE Pengembangan Bisnis dan Manajemen, Jakarta diolah, 2008.

Berdasarkan data tabel 3 di atas, terlihat bahwa mahasiswa yang tidak menggunakan bank syariah dikarenakan faktor kekurangpetahuan bank syariah, 70 orang (56%); karena faktor keharaman bunga bank, 40 orang (32%); dan karena faktor lokasi bank syariah baik dengan tempat tinggal maupun dengan tempat kerja, 15 orang (22%).

## 6.2 Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tidak Digunakannya Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil pengolahan data dan model yang telah dibuat, maka didapatkan persamaan model sebagai berikut :

$$\ln(p/1-p) = 2,383 - 1,130 \text{ Pengetahuan} - 0,299 \text{ Bunga}$$

Berdasarkan uji G, didapat nilai  $-2 \log \text{ likelihood}$  sebesar 189,331. dengan nilai yang besar ini, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat dimasukkan kedalam model. Sedangkan berdasarkan uji secara individual dengan menggunakan uji Wald, didapatkan hasil bahwa semua koefisien signifikan secara statistik pada  $\alpha = 5 \%$ , kecuali koefisien pada variabel Bunga.

Apabila lokasi = 0, maka probabilitas mahasiswa untuk tidak mempergunakan perbankan syariah adalah sebesar :

$$\ln(p/1-p) = 2,383$$

$$(p/1-p) = e^{2,383}$$

$$p = e^{2,383} / (1 + e^{2,383}) = 91,55 \%$$

Berdasarkan besaran intersep tersebut, terlihat bahwa keinginan terbesar pada mahasiswa untuk tidak mempergunakan perbankan syariah adalah dikarenakan kedekatan lokasinya.

Sedangkan nilai koefisien slope untuk variabel kekurangpengetahuan perbankan syariah dan variabel keharaman bunga bank memiliki tanda negatif, yaitu - 1,130 dan - 0,299 yang berarti peluang mahasiswa untuk tidak mempergunakan perbankan syariah dikarenakan kekurangpengetahuan perbankan syariah dan keharaman bunga bank lebih rendah apabila dibandingkan mereka yang tidak mempergunakan perbankan syariah dikarenakan lokasi bank syariah itu sendiri. Nilai  $\text{Exp}(B)$  untuk variabel kekurangpengetahuan perbankan syariah yang sebesar 0.323 dapat diartikan bahwa peluang mahasiswa untuk tidak mempergunakan perbankan syariah hanya 0,323 kali mereka yang tidak mempergunakan perbankan syariah dikarenakan lokasi bank syariah, dan nilai  $\text{Exp}(B)$  untuk variabel keharaman bunga bank yang sebesar 0,742 dapat diartikan bahwa dukungan dari mereka yang tidak mempergunakan perbankan syariah hanya 0,742 kali mereka yang tidak mempergunakan perbankan syariah dikarenakan lokasi bank syariah.

Dari interpretasi yang dilakukan terhadap model persamaan, maka perlu ada pengkajian kembali, mengapa perbankan syariah tidak dipergunakan oleh mahasiswa dikarenakan faktor lokasi bank syariah itu. Apakah promosi-promosi melalui edukasi dan sosialisasi tentang ekonomi syariah secara umum maupun perbankan syariah secara khusus dan keharaman bunga bank selama ini dilakukan belum memberi efek positif terhadap masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah atau dikarenakan sosialisasi tentang

perbankan syariah itu sendiri yang masih kurang dan belum optimal, terutama terhadap kalangan mahasiswa khususnya.

## 7. Kesimpulan dan Saran

### 7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, terlihat bahwa dasarnya mahasiswa belum memahami tentang apa itu perbankan syariah, lebih umum apa itu ekonomi syariah, memahami keharaman bunga bank, sedangkan faktor lokasi sebenarnya hanya pengaruh 2 variabel sebelumnya, apabila variabel pengetahuan bank syariah dan keharaman bunga bank dipahami betul maka lokasi bank syariah itu tidak jadi permasalahan yang pokok, apalagi saat ini melalui *office channeling* kondisi itu dapat di atasi.

Di samping itu, adanya sosialisasi yang belum optimal dilakukan oleh *stakeholder* terkait pengembangan syariah dikarenakan metode sosialisasi yang masih perlu dilakukan pendekatan yang khusus kepada mahasiswa pada khususnya, utamanya oleh BI dan bank-bank syariah.

### 7.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, ke depan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari masyarakat utamanya pihak pemerintah dan pelaku dunia perbankan syariah pada khususnya. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, yaitu antara lain:

- (a) Sudah seharusnya, materi tentang bank syariah dapat dipelajari di sekolah-sekolah pra perguruan tinggi melalui pelajaran Agama Islam;
- (b) Materi tentang bank syariah wajib dipelajari di semua perguruan tinggi melalui pelajaran Agama Islam dan utamanya mahasiswa ekonomi melalui mata-mata kuliah ekonomi yang disamakan;
- (c) Sosialisasi perbankan syariah perlu juga dilakukan kepada pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat utamanya para pengambil kebijakannya seperti bupati, anggota dewan, dan petinggi pemda;
- (d) Sosialisasi juga dilakukan pada majlis-majlis ta'lim yang tersebar merata di seluruh Indonesia, termasuk pesantren-pesantren.
- (e) Dan pada akhirnya masyarakat luas perlu mendapatkan informasi tentang perbankan syariah ini termasuk orang non Islam karena berdasarkan hasil penelitian penulis di Pegadaian Syariah, Jakarta terdapat non muslim juga yang menjadi nasabahnya.

Jika gerakan edukasi dan sosialisasi dilakukan secara optimal dan tepat, maka *market share* bank syariah 5,2%, dapat dicapai dengan cepat dengan basis nasabah terutama mahasiswa sebagai penerus pembangunan bangsa ini yang memiliki *istiqamah*, bermoral dan rasional, tidak mudah berpindah-pindah ke bank konvensional. Upaya BI mendesak bank-bank konvensional yang membuka *office channeling* agar menempelkan logo adanya layanan syariah di kantor bank konvensional, sangat bagus. Namun masyarakat harus dicerdaskan mengapa harus memilih bank syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku, Hasil Penelitian*

- Antonio, Muhammad Syafe'i, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Cetakan ke-4, Gema Insani Press: Jakarta, 2001.
- Karim, Adiwarmanto A., Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer, Cetakan Pertama, Gema Insani Press: Jakarta, 2001.
- Nachrowi, Djalal Nachrowi dan Hardius Usman, Penggunaan Teknik Ekonometrika, Cetakan 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2002.
- Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta: 1990.

- Nazir, Moh., Metode Penelitian, Cetakan 3, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1988.
- Qordhowi, Yusuf, 1997, Norma dan Etika Ekonomi Islam, translate Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Cetakan ke-1, Gema Insani Press: Jakarta.
- Rahardjo, M. Dawam, 1990, Etika Ekonomi dan Manajemen, Cetakan Pertama, Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Tim Studi Lembaga Penelitian IPB, Bank Syariah: Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat di Wilayah Jawa Barat, Kerjasama Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia dengan Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor, 2000.
- Majalah, Koran**
- Agustianto, Menyoroti Minimnya Sosialisasi Perbankan Syariah, [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com), download pada 02 Januari 2008.
- Baraba, Achmad, Mengintip Peluang Bank Syariah Kelola Kredit UKM di BPPN, Koran Media Indonesia, 2002.
- Hamidi, M. Luthfi, Satu Dasawarsa Jejak Bank Syariah di Indonesia, Republika, Jum'at, 5 April 2002.
- Majalah Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 5 - 2003, EKABA - USAKTI, Jakarta.
- Majalah Ekonomi & Bisnis Syariah 'Sharing', Edisi Khusus Tahun I, Oktober 2007
- Majalah Ekonomi & Bisnis Syariah 'Sharing', Edisi 12 Tahun I, Desember 2007
- Majalah Ekonomi & Bisnis Syariah 'Sharing', Edisi 13 Tahun II, Januari 2008
- Rais, Sasli, Sejarah dan Prospek Perkembangan Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia, [www.psktti.com](http://www.psktti.com) (Website S2 Ekonomi & Keuangan Syariah, Universitas Indonesia), September 2002.
- ....., Timbang *Maslahat-Madharat*, Fatwa Haramnya Bunga Bank, Artikel belum dipublikasikan, Juni 2004.
- Republika, Jum'at, 19 Desember 2003